

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Munculnya masalah *good corporate governance* (GCG) terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Suad Husnan, 2007). Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksir konsep GCG sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat, dalam rangka *economy recovery* (Sulistyanto & Lidyah, 2002). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya (Sulistyanto & Wibisono, 2003). Survei yang dilakukan La Porta, Lopez, Shleifer, dan Vishny pada tahun 1998-2000 mengenai perlindungan investor dan *corporate governance* mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penerapan GCG yang rendah (Fajari, 2004)

Sedangkan Bank Dunia dalam sebuah survei *Governance Research Indicator Country Snapshot* tahun 2002 memberi Indonesia skor rata-rata di bawah 25 dari kemungkinan 1-100 untuk enam kategori penilaian, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga yang memperoleh skor rata-rata di atas 50 (Fajari, 2004). Sehingga tidak mengejutkan jika hasil penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan bahwa penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional (Sulistyanto & Wibisono, 2003). Dengan kata lain, penerapan konsep GCG

yang tidak optimalah yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di negara-negara Asia khususnya Indonesia.

Corporate governance (CG) diartikan sebagai sebuah sistem yang mana perusahaan dijalankan dan dikendalikan (Cadbury, 1992 dalam Ballesta & Garcia-Meca, 2005). Walaupun istilah CG hampir tidak dikenal di Indonesia pada masa sebelum krisis, namun pada dasarnya terminologi tersebut digunakan untuk suatu konsep lama berupa kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan *stakeholder*. Konsep kewajiban fidusiari didasari oleh *agency theory* dimana permasalahan *agency* muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Dengan kata lain, dewan komisaris dan direksi sebagai *agent* dalam suatu perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham (Herwidayatmo, 2000).

CG mempengaruhi pengembangan dan fungsi dari pasar modal dan mendorong pengoptimalan alokasi sumber daya sehingga dapat mengurangi pengawasan *shareholder* atas perusahaan dan biaya audit (Ballesta & Garcia-Meca, 2005). Lebih lanjut, karakteristik CG dan sistem hukum perlindungan investor juga mempengaruhi fungsi auditor dan tuntutan atas kualitas audit (Piot, 2001 dalam Ballesta & Garcia-Meca, 2005). Pertimbangan auditor mengenai pengendalian internal perusahaan pada laporan keuangan yang diperiksanya, sebagai salah satu dasar pelaksanaan auditing yang dinyatakan dalam asersi manajemen bahwa karakteristik CG khususnya *board of directors* (dewan komisaris) diharapkan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas praktek pelaporan keuangan (Ballesta & Garcia-Meca, 2005). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Pratolo (2007) bahwa baik buruknya *good corporate governance* BUMN

di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern pada BUMN tersebut (Pratolo, 2007). Padahal, pengendalian intern adalah salah satu dasar pemeriksaan laporan keuangan yang pada akhirnya akan menjadi dasar pertimbangan auditor dalam memberikan opininya. Dengan demikian, CG juga mempengaruhi pendapat auditor atas laporan keuangan yang diperiksa. Suatu struktur GCG akan membantu auditor mengurangi tekanan manajemen agar auditor memberikan opini yang mereka harapkan (Ballesta & Garcia-Meca, 2005).

Beberapa penelitian terdahulu (Chang & Walter, 1996; Chen *et al.*, 2001; Ballesta & Garcia-Meca, 2005) telah meneliti apakah perusahaan dengan tata kelola (CG) yang baik akan menerima lebih banyak laporan audit yang *unqualified* dibanding perusahaan yang tidak memiliki tata kelola (CG) yang baik. Chang dan Walter (1996) menunjukkan hasil bahwa laporan audit *qualified* akan diberikan kepada perusahaan yang memiliki lebih banyak proporsi ekuitas yang dimiliki oleh manajemen. Selanjutnya Chen *et al.*, (2001) menemukan bahwa probabilitas dalam menerima kualifikasi audit menurun dengan meningkatnya kepemilikan manajemen atas saham perusahaan dan kepemilikan oleh perusahaan luar negeri. Lebih lanjut Gul *et al.*, (2001) menguji hubungan antara dominansi dewan direksi pada perusahaan keluarga dan kecenderungan perusahaan tersebut menerima kualifikasi audit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dewan direksi yang dominan pada perusahaan keluarga cenderung untuk bertindak berdasar kepentingan perusahaan dan mempersiapkan laporan keuangan yang lebih kecil kemungkinannya untuk menerima kualifikasi audit.

Rendahnya penerapan konsep GCG di Indonesia dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten merupakan motivasi penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada

hasil proses audit dengan ada atau tidak adanya suatu kualifikasi audit (*audit qualification*), yang mana hal tersebut merupakan perhatian utama para pengguna laporan keuangan. Hasil proses audit yang difokuskan dalam penelitian ini adalah laporan audit yang memuat kualifikasi audit, dan hubungannya dengan struktur *corporate governance* yang baik (GCG).

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Secara empiris terbukti bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi *constrain* bagi aktivitas rekayasa kinerja yang dilakukan manajemen (Sulistyanto & Wibisono, 2003). Secara teoritis rekayasa yang dikenal dengan istilah *earnings management* ini bertujuan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan yang ingin mengetahui kinerja perusahaan dan untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi. Rekayasa keuangan ini tidak sejalan dengan semangat GCG yang menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi informasi yang akurat dan menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sehingga penerapan prinsip GCG di Indonesia sebenarnya diharapkan juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah ada pengaruh struktur *good corporate governance* terhadap kualifikasi audit yang diterima oleh perusahaan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh struktur CG terhadap kualifikasi audit yang diterima oleh perusahaan. Struktur CG yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepemilikan terpusat, *insider ownership*, jumlah anggota dewan komiaris, jumlah anggota komite audit dan jumlah pertemuan komite audit.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengidentifikasi perusahaan yang akan (mempunyai kecenderungan) menerima kualifikasi audit dan untuk mengidentifikasi perusahaan yang potensial untuk mendapatkan kualifikasi audit. Manfaat tersebut dapat digunakan oleh auditor maupun calon investor. Auditor dapat menggunakannya untuk melakukan penilaian atas resiko *engagement* termasuk dapat digunakan dalam proses perencanaan audit (Dopuch *et al.* 1987). Sedangkan untuk calon investor atau pelaku pasar yang lain yang mendasarkan keputusan pada laporan keuangan *audited*, di mana investor pasti lebih memilih perusahaan yang laporan keuangannya *unqualified*. Identifikasi perusahaan tersebut berguna untuk menetapkan keputusan untuk berinvestasi atau tidak pada perusahaan yang cenderung atau potensial mendapatkan kualifikasi audit.

1.5. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya memfokuskan pada efek dari struktur *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap nilai pasar, pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan secara sukarela dan kinerja perusahaan (Piot, 2001). Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian

ilmu akuntansi, khususnya *agency theory* dan *corporate governance theory*, sehingga dapat diperoleh model struktur *corporate governance* yang secara konseptual mempengaruhi kualifikasi audit.

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penyajian hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab satu menyajikan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian. Bab dua menyajikan landasan teori yang menjadi dasar acuan dalam membentuk rerangka penelitian. Bab tiga menyajikan metodologi penelitian, yang di dalamnya akan dibahas mengenai data, sampel dan analisa data yang dilakukan. Bab empat menyajikan pembahasan hasil penelitian. Bab lima menyajikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori

Teori agensi (*agency theory*) menekankan pentingnya pemilik perusahaan (prinsipal) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (agen) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha (YPPMI & SC, 2002). Aplikasi teori ini pada perusahaan terwujud dalam sebuah kontrak kerja antara agen dan prinsipal yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan (Arifin, 2005).

Masalah *corporate governance* dapat ditelusuri dari pengembangan *agency theory* yang menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham atau pemilik perusahaan) akan berperilaku, karena mereka pada dasarnya mempunyai kepentingan berbeda. Manajer mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka (gaji), di sisi lain manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham yang berupa bagian laba yang dibagikan pada pemegang saham (deviden).

Perilaku ini mempunyai sisi negatif, yang memunculkan permasalahan agensi. Keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung pemilik perusahaan.

Kondisi ini terjadi karena manajer sebagai pengelola dan pengendali perusahaan, mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai perusahaan, sedangkan pemilik hanya mempunyai informasi yang terbatas saja sehingga menimbulkan asimetri

informasi (*information asymmetry*) antara kedua pihak tersebut. Di mana pemilik tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (Richardson, 1998; DuCharme *et al.*, 2000). Rekayasa ini merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya (Healy & Wahlen, 1998; DuCharme *et al.*, 2000). Sehingga secara prinsipil manipulasi ini tidak sejalan dengan prinsip GCG.

Asimetri informasi antara manajemen dan pemakai laporan keuangan memberi kesempatan dan mendorong manajemen bersikap oportunistik dengan memperbaiki profil laba akuntansi (Richardson, 1998; Chambers, 1999 dalam Sulistyanto & Wibisono, 2003). Sikap oportunistik ini tidak sejalan dengan semangat GCG karena rekayasa keuangan mengakibatkan informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat dan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sikap oportunistik ini dinilai sebagai sikap curang (*fraud*) manajemen yang diimplikasikan dalam laporan keuangannya pada saat menghadapi *intertemporal choice* (Beneish, 2001 dalam Sulistyanto & Wibisono, 2003). Sikap curang tersebut didefinisikan sebagai satu atau lebih tindakan yang disengaja yang didesain untuk menipu orang lain yang menyebabkan kehilangan kekayaannya (financial). Keberhasilan dari sikap ini dinilai ketika manajemen berhasil menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaannya.

Walaupun "logis" dilakukan manajemen karena kesuperiorannya dalam menguasai informasi, rekayasa ini tidak sejalan dengan semangat GCG yang menekankan pentingnya hak pemakai laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat (YPPMI & SC, 2002 dalam Sulistyanto

& Wibisono, 2003). Chtorou *et al.* (2001) dalam Sulistyanto & Wibisono, 2003 pada penelitiannya yang menguji apakah praktik CG mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan-menyimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG akan menjadi kendala (*constrain*) aktivitas *earnings management*. Penelitian tersebut menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi rekayasa yang dilakukan manajemen. Beasley *et al.* (1996) dan Abbott *et al.* (2000) dalam Sulistyanto & Wibisono, 2003 yang menduga ada hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan (*financial reporting*) membuktikan meningkatnya kualitas laporan keuangan karena penerapan prinsip tersebut secara konsisten.

2.2. Good Corporate governance

Terdapat banyak pengertian GCG yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan badan GCG seperti *Forum for Corporate governance in Indonesia*, *Cadbury Committee* dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, oleh karena itu mengambil definisi GCG yang dikeluarkan oleh Menteri/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan SK yang bernomor 23/M-PM/BUMN/2000 tentang pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan, GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan (Arifin, 2005).

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian GCG yang dikemukakan oleh badan internasional maupun ahli di bidang GCG. Pengertian CG menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD atau negara-negara maju dalam tatanan *common law system*, mengacu kepada pembagian kewenangan antara

semua pihak yang menentukan arah dan *performance* suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah pemegang saham, manajemen, dan *board of directors*. Karena perbedaan sistem hukum di Indonesia yang menganut *civil law*, maka ketiga pelaku utama tersebut adalah pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dengan demikian, direksi di Indonesia adalah manajemen menurut terminologi yang digunakan dalam bahasa CG, sedangkan dewan komisaris lebih merupakan *board of directors* (Herwidayatmo, 2000). Sedangkan Barako *et al.*, (2006) mengemukakan bahwa karakteristik GCG terdiri dari unsur dewan komisaris, direksi dan komite audit. Ballesta dan Garcia-Meca (2005) mengajukan pemilik (pemegang saham) dan dewan komisaris sebagai unsur GCG Dalam penelitian ini, mengacu pada Ballesta dan Garcia-Meca (2005) tersebut menggunakan unsur GCG yang terdiri dari pemilik, dewan komisaris ditambah dengan satu unsur yang akan diajukan sebagai variabel independen yaitu komite audit.

CG mengandung suatu resiko yang dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai resiko yang ditanggung atau yang dihadapi auditor atas lemahnya kualitas mekanisme *corporate governance* klien karena akan berdampak pada proses dan hasil audit. Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, berupa *internal mechanisms* seperti komposisi dewan direksi/dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Kedua, *external mechanisms* seperti pengendalian oleh pasar dan *level of debt financial*. Sedangkan menurut Iskandar dan Chamlaui (2000) mekanisme pengawas dalam *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan

pertemuan dengan *board of directors*. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan lain dengan menggunakan mekanisme eksternal perusahaan seperti pengendalian oleh pasar. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengendalian oleh *internal mechanisms*

2.3. Kualifikasi Audit

Audit qualification biasanya berupa suatu dakwaan final mengenai performen keuangan yang lemah dari sebuah perusahaan (Hua, 1996). Dalam bahasa Inggris opini auditor dibedakan menjadi *unqualified* dan *qualified opinion*. *Unqualified* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 'wajar tanpa syarat' sedangkan *qualified* diterjemahkan sebagai 'wajar dengan pengecualian.' Dalam penelitian ini kualifikasi audit dimaksudkan sebagai suatu opini atau pernyataan auditor di luar opini *unqualified* (di luar opini wajar tanpa pengecualian atau tanpa syarat). Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 1994) menyatakan bahwa jenis pendapat auditor selain wajar tanpa syarat adalah wajar dengan pengecualian (*qualified*), tidak wajar (*adverse*) dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Sedangkan pada beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Malta, opini selain wajar tanpa syarat adalah: *limitation on scope*, *going-concern*, *disagreement with management*, *disclaimer of opinion* dan *adverse opinion* (Farrugia & Baldacchino, 2005). Opini *limitation on scope*, *going-concern*, *disagreement with management* tidak di lazim diberikan auditor di Indonesia..

Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan (Agoes, 1996).

Selanjutnya opini *adverse* diberikan oleh auditor berdasar pada kesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Di mana auditor merasa yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan memuat salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi. Sedangkan *disclaimer of opinion* diberikan apabila auditor tidak memiliki bukti yang memadai untuk memberikan pendapat, sehingga tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar (Arens & Loebbecke, 1996).

Opini *limitation on scope* diberikan oleh auditor jika auditor tidak memiliki teknik audit yang memungkinkannya untuk dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), sehingga auditor tidak dapat menentukan area mana yang tidak dapat diverifikasi atau dihitung dampak kualifikasinya pada laporan keuangan. Secara spesifik dapat ditambahkan bahwa opini tersebut dapat juga diberikan jika auditor tidak dapat melaksanakan prosedur auditing utama yang dibutuhkan untuk dapat menerima kelemahan SPI, kesenjangan pada akuntansi atas kas hasil penjualan, ketiadaan barang persediaan dan kesenjangan konfirmasi dari beberapa item yang terkandung dalam neraca (Farrugia & Baldacchino, 2005).

Opini *going concern* diberikan apabila auditor menilai ada keraguan yang substansial terhadap kemampuan klien untuk melanjutkan perusahaan sebagai *going-concern entity*. Penilaian ini seharusnya mempertimbangkan rencana dan kemampuan manajemen

untuk mengurangi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang terjadi secara memuaskan (Parker *et al.*, 2005).

Disagreement with management adalah suatu opini yang diberikan jika auditor menemui salah satu dari tiga kondisi, yaitu yang pertama tidak setuju dengan manajemen mengenai laporan keuangan konsolidasian yang dikeluarkan oleh perusahaan induk. Kedua, auditor tidak setuju dengan manajemen sehubungan dengan perlakuan akuntansi yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan standard sehingga menyebabkan adanya kesenjangan dalam penilaian property atau asset. Ketiga, ketidaksetujuan dengan manajemen apabila manajemen tidak menyediakan depresiasi atau properti atau asset tetap (Farrugia & Baldacchino, 2005).

Penelitian ini dilakukan di Indonesia, untuk itu kualifikasi audit yang digunakan mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 1994) bahwa jenis pendapat auditor selain wajar tanpa pengecualian atau tanpa syarat adalah wajar dengan pengecualian (*qualified*), tidak wajar (*adverse*) dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*).

2.4. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap kualifikasi audit pernah dilakukan sebelumnya oleh Sari (2007). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat dalam beberapa hal. Pertama, Sari (2007) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kualifikasi audit. Dalam penelitian tersebut hanya dipaparkan bahwa kualifikasi audit adalah opini audit, tanpa membedakan opini yang mana yang dimaksudkan sehingga timbul kerancuan dalam definisi operasionalnya. Kedua, penelitian ini menambahkan variabel kontrol yang mempunyai kemungkinan sebagai penyebab bagi perusahaan menerima kualifikasi audit dalam laporan auditnya. Variabel kontrol tersebut

adalah ukuran perusahaan, *leverage* yang merepresentasikan efek, profitabilitas dan likuiditas. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol tersebut karena variabel tersebut mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi opini audit (Ballesta dan Garcia-Meca, 2005) sehingga harus dinetralkan agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan independent yang sedang diteliti.

2.5. Hubungan Struktur *Good Corporate governance* dan Kualifikasi Audit

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kualifikasi audit dan struktur *corporate governance* (Chang & Walter, 1996; Chen *et al*, 2001; Ballesta & Garcia-Meca, 2005). Lebih lanjut, Keasey *et al.*(1988) meneliti hubungan beberapa variabel yang dapat menjelaskan kualifikasi audit. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar, perusahaan yang menerima kualifikasi sebelumnya, mempunyai pinjaman yang aman, pendapatan yang semakin menurun, *audit lag* yang besar dan sedikit pemilik saham yang bukan komisaris, cenderung untuk menerima kualifikasi audit dibandingkan dengan perusahaan lain. Kemudian, Beasley dan Petroni, 1998 (dalam Ballesta & Garcia-Meca, 2005) juga menemukan bahwa kecenderungan mendapatkan kualifikasi audit dari perusahaan penjamin asuransi menggunakan nama auditor yang mempunyai spesialisasi dalam industri asuransi meningkat dengan adanya porsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen).

Struktur GCG selanjutnya adalah kepemilikan terpusat atau sejumlah saham yang dimiliki oleh kelompok mayoritas pemegang saham. Di mana kelompok mayoritas tersebut mempunyai kontrol yang lebih besar kepada manajemen perusahaan (Ballesta dan Garcia-

Meca,2005). Sehingga diharapkan pemegang saham mayoritas akan lebih dapat mengurangi kemungkinan *agency conflict* antara manajer dan pemegang saham.

Struktur selanjutnya adalah kepemilikan saham oleh manajemen yang sering disebut sebagai *insider ownership* atau *managerial ownership*. Beberapa literature menunjukkan bagaimana alokasi saham antara pemilik insider (manajemen) dan outsider dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Jensen and Meckling, 1976; Liu and Sun, 2005 dalam Shin-Ping dan Tsung_Hsien, 2009).

Bathala *et al.* (1994) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan, hal ini berdasarkan suatu pemikiran bahwa manajer yang juga adalah pemegang saham akan menyelaraskan kepentingan dua pihak tersebut. Artinya manajer tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan atau mengurangi kepentingan pemegang saham. Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian yang dilakukan di China oleh Chen *et al.* (2001) dalam Ballesta dan Garcia Meca (2005), yang menyatakan bahwa meningkatnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajer akan menyebabkan turunnya penerimaan kualifikasi audit oleh perusahaan. Namun demikian, hasil tersebut tidak terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Hua (1996) yang menyatakan sebaliknya. Yaitu bahwa perusahaan dengan proporsi sejumlah besar saham yang dimiliki oleh manajer memberikan pengaruh atau mendorong perusahaan menerima kualifikasi audit.

Klein (2002) dalam Herawaty (2008) menyatakan bahwa besarnya *discretionary accrual* lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari sedikit komisaris independen dibanding perusahaan yang mempunyai komite audit yang terdiri banyak komisaris independen. Hal ini mendukung penelitian Dechow *et al.*, (1996) dalam

Herawaty (2008) bahwa perusahaan memanipulasi laba lebih besar kemungkinannya apabila memiliki dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki *Chief Executive Officer (CEO)* yang merangkap menjadi *chairman of board*. Hal ini berarti tindakan memanipulasi akan berkurang jika struktur dewan direksi berasal dari luar perusahaan. Jika fungsi independensi dewan direksi cenderung lemah, maka ada kecendrungan terjadinya moral hazard yang dilakukan oleh para direktur perusahaan untuk kepentingannya melalui pemilikan perkiraan-perkiraan akrual yang berdampak pada manajemen laba dan konsisten dengan Wedari (2004) dalam Herawaty (2008) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *discretionary accruals*.

Struktur keanggotaan dewan komisaris yang terdiri dari keluarga tidak didukung dengan data yang diperlukan. Untuk itu variabel keanggotaan keluarga dalam dewan komisaris ditiadakan. Meskipun faktanya, Indonesia banyak didominasi perusahaan keluarga sehingga sangat mungkin anggota dewan komisarisnya terdiri dari keluarga, namun data yang diperlukan tidak tersedia. Variabel ini diganti dengan komite audit.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Ballesta & Garcia-Meca (2005) dengan menambahkan satu variabel independen yaitu komite audit. Komite audit adalah struktur yang sangat krusial dalam sebuah mekanisme CG. Tugas komite audit dalam suatu perusahaan adalah mengatur, menjaga dan mengawasi fungsi audit internal dan system pengendalian internal perusahaan (Rezaee *et al.*, 2003). Mengenai SPI, COSO (1992:13) menyatakan bahwa:

Internal Control is a process, affected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

- *Effectiveness and efficiency of operations.*
- *Reliability of financial reporting.*
- *Compliance with applicable laws and regulations.*

Definisi COSO tentang pengendalian intern tersebut memperjelas bahwa pengendalian intern bukan hanya mempengaruhi laporan keuangan yang *reliable* tetapi juga menunjukkan bahwa pengendalian seharusnya efektif untuk semua operasi (Pratolo, 2007). Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif diperlukan fungsi audit internal dengan tugas: mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi. Opini auditor diberikan berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, yang mana penyusunan laporan keuangan tidak pernah terlepas dari efektifitas SPI perusahaan.

Banyak penelitian yang menguji hubungan antara karakteristik komite audit dan dewan komisaris, syarat penting dalam GCG, dengan upaya *earnings management* sebagai ukuran keberhasilan penerapan prinsip GCG (Chtourou *et al.*, 2001). Carcello & Neal (2000) menguji proporsi independensi komite audit menyimpulkan adanya hubungan positif antara komite tersebut dengan berkurangnya tekanan manajemen terhadap komite audit pada saat menyusun laporan keuangan.

Independensi komite audit merupakan salah satu ukuran penerapan prinsip GCG selain kompetensi dan aktivitas komite audit. Sehingga dapat dikatakan bahwa independensi komite audit mempunyai hubungan positif dengan level rekayasa keuangan yang dilakukan

manajemen (Westphal & Zajac, 1997). Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Dezoort & Salterio (2001) juga menyimpulkan bahwa komite audit akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap rekayasa yang dilakukan manajemen. Sehingga apabila manajemen mempunyai keleluasaan yang semakin sempit dengan adanya komite audit yang efektif, dapat dipahami jika laporan keuangan yang dihasilkan akan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Pada gilirannya, laporan keuangan tersebut mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, dengan ketiadaan *earnings management*. Dengan demikian dapat dipahami apabila tugas komite audit berhubungan dengan opini audit.

Terdapat beberapa karakteristik efektifitas komite audit yaitu jumlah komite audit, tipe anggota komite audit dan jumlah pertemuan yang digelar setiap tahun. Dalam penelitian ini digunakan dua dari tiga karakteristik tersebut. Yaitu jumlah anggota komite audit dan jumlah pertemuan yang digelar komite audit per tahunnya.

Jumlah komite audit di Indonesia diatur minimal tiga orang dan tidak menunjukkan berapa jumlah maksimalnya. Dalam penelitian terdahulu (Lipton dan Lorsch, 1992; John dan Senbet, 1998 dalam Pucheta-Martinez dan de Fuentes, 2007) dinyatakan bahwa kapasitas komite audit dalam hal melakukan monitoring meningkat ketika jumlah anggotanya bertambah, namun merekomendasikan jumlah maksimal pada tujuh atau delapan orang saja. Karena jumlah yang terlalu besar akan menimbulkan kesulitan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, semakin besar/banyak jumlah anggota komite audit semakin sulit bagi manajer untuk menekan komite audit. Sehingga menjadikan manajer lebih sulit untuk mengabaikan penyesuaian yang diajukan oleh auditor.

Sedangkan pertemuan yang digelar komite audit, diharapkan anggota komite audit yang sering mengadakan pertemuan dapat melaksanakan tugas mereka dengan cara yang lebih efektif dibanding yang jarang atau tidak pernah mengadakan pertemuan. Konsekuensinya, komite audit yang menggelar pertemuan minimal tiap tahun akan cenderung lebih dapat mengetahui adanya ketidakcocokan antara manajemen dan auditor dalam hal akuntansi dan dalam hal keuangan lainnya. Sehingga komite audit tersebut akan lebih dapat menyelesaikan perbedaan yang ada dibandingkan komite audit yang tidak sering menggelar pertemuan (Pucheta-Martinez dan de Fuentes, 2007). Penelitian ini mengambil satu karakteristik efektifitas komite audit yaitu jumlah anggota. Hal ini karena tidak tersedianya data yang diperlukan untuk karakteristik yang lain. Dari penjelasan dan paparan sebelumnya mengenai landasan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H1 : perusahaan dengan kepemilikan terpusat, cenderung kurang menerima kualifikasi audit.
- H2 : perusahaan dengan porsi kepemilikan oleh anggota dewan komisaris kurang menerima kualifikasi audit.
- H3 : Kecenderungan perusahaan menerima kualifikasi audit dipengaruhi oleh jumlah anggota dewan komisaris.
- H4 : Kecenderungan perusahaan menerima kualifikasi audit dipengaruhi oleh jumlah anggota komite audit.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2003-2005. Data berupa laporan keuangan yang sudah diaudit dapat diperoleh dari *data base* yang dimiliki oleh jurusan akuntansi FE UMS dan mengunduh dari www.idx.co.id *website* resmi Bursa Efek Indonesia. Sedangkan informasi lain seperti porsi kepemilikan saham perusahaan, komite audit, dewan komisaris dan sebagainya dapat diperoleh dari prospektus perusahaan dengan *mengcopy* dari Pojok BEI beberapa universitas seperti Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya. Penelitian ini tidak akan mengikutsertakan perusahaan keuangan karena perusahaan tersebut mempunyai karakteristik rasio finansial yang spesifik. Rasio finansial tersebut membedakan perusahaan keuangan dengan perusahaan lain yang mana rasio tersebut dapat dijadikan salah satu dasar bagi auditor untuk memberikan pendapatnya (Ballesta & garcia-Meca, 2005), di mana perusahaan lain tidak memilikinya sehingga tidak dapat menjadikan perusahaan keuangan setara dengan perusahaan lain.

Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling method* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Cooper, 1996). Pada penelitian ini kriteria yang diperlukan dalam penarikan sampel adalah :

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, kecuali perusahaan lembaga keuangan pada periode 2003, 2004 dan 2005. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan pengaruh regulasi tertentu yang dapat mempengaruhi variabel penelitian.

2. Perusahaan yang mendapatkan kualifikasi dalam laporan auditnya dan perusahaan yang tidak mendapatkan kualifikasi dalam laporan auditnya.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualifikasi audit. Yang dimaksud dengan kualifikasi audit adalah opini auditor (AO) yang diberikan kepada perusahaan selain opini wajar tanpa pengecualian. Opini audit dibedakan dalam dua pendapat yaitu *unqualified* dan *qualified*. *Unqualified* adalah opini yang diberikan pada laporan keuangan klien jika auditor beranggapan bahwa laporan tersebut wajar tanpa pengecualian (*true and fair*). Sedangkan *qualified* adalah opini yang diberikan auditor selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Variabel ini diberikan nilai 1 (satu) jika *qualified* dan 0 (nol) jika *unqualified*. Penelitian ini tetap mempertahankan terminologi kualifikasi audit. Karena kualifikasi audit lebih mencerminkan pendapat auditor selain ‘wajar tanpa pengecualian.’ Dan lebih memilih menggunakan kata kualifikasi dibanding kualitas, karena kata kualitas dapat menimbulkan kerancuan dalam pandangan awam.

3.2.2. Variabel Independen

Variabel independen yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

3.2.2.1. Block

Proporsi saham yang dikuasai oleh pemegang saham yang signifikan yaitu >50% atau pemegang saham mayoritas. Menurut McConnell dan Servaes (1990) pemilik saham dengan proporsi yang signifikan dapat bertindak sebagai alat yang efektif sebagai fungsi monitoring terhadap manajemen. Dengan kata lain, pemegang

saham mayoritas dalam perusahaan memiliki hak penuh atas keputusan yang diambil oleh manajemen dan dengan demikian memiliki kendali atas segala aktivitas manajemen. Variabel *block* ini diukur dengan prosentase saham yang dimiliki para pemegang saham.

3.2.2.2. Ins_Own

Proporsi saham yang dikuasai oleh anggota manajemen atau dewan direksi perusahaan. Variabel ini berupa prosentase saham yang dimiliki oleh dewan manajemen atau dewan direksi. Sesuai dengan terminologi manajemen yang digunakan oleh masing-masing perusahaan berbeda. Beberapa perusahaan menyebut manajer sedangkan perusahaan lain menyebut direksi.

3.2.2.3. Board_size

Variabel ini menunjukkan jumlah anggota independen dalam susunan dewan komisaris. Sehingga diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris

3.2.2.4. Board_AC

Variabel ini menunjukkan jumlah anggota dalam susunan komite audit dalam perusahaan, Sehingga diukur menggunakan angka berdasar jumlah anggota yang terdapat dalam komite audit.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol selain struktur CG, yang mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi opini audit. Yaitu pendapatan penjualan (*sales revenue/L_sales*) yang diukur dengan nilai logaritma dari pendapatan penjualan tahunan. Variabel ini merepresentasikan ukuran atau besar kecilnya perusahaan. Perusahaan

besar cenderung memiliki SPI keuangan yang lebih formal dan maju, dengan demikian akan cenderung kurang menerima kualifikasi audit. Lebih lanjut, perusahaan besar mempunyai lebih kecil kecenderungan untuk gagal (Ballesta & Garcia-Meca, 2005).

Variabel kontrol selanjutnya adalah resiko yang diprosikan dengan efek *leverage* (*Lev*) yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan total aset. Resiko diharapkan mempunyai hubungan yang positif dengan kualifikasi audit. Menurut Chang dan walter (1996), saat resiko keuangan perusahaan meningkat auditor mempunyai pendorong untuk lebih waspada dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam konteks ini, prosedur yang ditempuh auditor cenderung akan lebih akurat dan kesalahan pada akuntansi dan laporan keuangan klien dapat ditemukan. Performen perusahaan (*profitability/Prof*) adalah variabel kontrol selanjutnya, yang diukur dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, variabel likuiditas (*Liquidity*) diukur dengan rasio aset terhadap hutang. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola hutang dalam hal ini, mengembalikannya. Perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi mempunyai kemampuan tinggi untuk mengembalikan hutangnya. Pada kasus opini kualifikasi yang diterima beberapa perusahaan di Indonesia (misalnya PT. Centris Multipersada tahun 2002/2003), ketidakmampuan dalam mengembalikan hutang adalah penyebabnya. Sehingga apabila perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi diharapkan untuk kurang menerima kualifikasi pada laporan auditnya.

3.3. Teknik Analisis Data

Data selanjutnya diolah dengan menggunakan *multivariate logistic regression*. Dengan demikian, uji asumsi klasik dilakukan terlebih dulu. Model analisis regresi logistik digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel

independennya (Ghozali, 2005). Regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh dari sistem *corporate governance* terhadap kualifikasi dalam laporan audit. Pada regresi *dummy*, variabel yang berupa skala nominal dan ordinal adalah variabel independen, sedangkan untuk regresi logistik variabel yang merupakan skala ordinal adalah variabel dependen (Purbayu & Ashari, 2005). *Logistic regression* ini berguna ketika dalam memeriksa hubungan antara probabilitas dari jawaban yang didapat (dalam kasus ini, struktur *corporate governance* yang berkualitas akan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk mendapatkan kualifikasi dalam laporan auditnya).

Model yang digunakan untuk menentukan faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan kualifikasi audit adalah sebagai berikut.

$$AO = b_0 + b_1 \text{Block} + b_2 \text{Ins_own} + b_3 \text{Board_size} + b_4 \text{Board_AC} + b_5 \text{Prof} + b_6 \text{L_sales} + b_7 \text{Lev} + b_8 \text{Liquidity} + e$$

Keterangan:

Block = Proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham (>5%)

Ins_own = Proporsi saham yang dimiliki oleh dewan komisaris

Board_size = Jumlah anggota dewan komisaris

Board_AC = Jumlah anggota komite audit

Prof = ROA

L_sales = ukuran perusahaan

Lev = *Leverage*

Liquidity = Likuiditas

b₀ = Konstanta

b₁...b₉ = Koefisien Regresi

Lebih lanjut, analisis pengujian dengan regresi logistik menurut Santoso (2001) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menilai kelayakan model regresi

Penilaian kelayakan model regresi dilakukan dengan memperhatikan output uji dari Hosmer dan Lemeshow, dengan hipotesis:

H_0 : Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

H_1 : Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Dasar pengambilan keputusan:

Nilai *goodness of fit test* yang diukur dengan *chi-square* pada bagian bawah uji Hosmer dan Lemeshow:

- Jika probabilitas $> 0,05$ H_0 diterima
- Jika probabilitas $< 0,05$ H_0 ditolak

1. Menilai keseluruhan model (*overall model fit*).

Angka -2 Log Likelihood (LL) pada awal (Blok Number = 0) dan angka -2 Log Likelihood pada Blok Number = 1. Jika terjadi penurunan angka -2 Log Likelihood (Blok Number 0 – Blok Number 1) menunjukkan model regresi yang baik. Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “*sum squared error*” pada model regresi, sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi yang baik.

2. Menguji koefisien regresi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah:

- Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 10%. Mason (1999) menyebutkan bahwa tidak terdapat satu level signifikansi yang diaplikasikan untuk semua pengujian. Pada umumnya level 5% (0,05) untuk riset konsumen, level 1% (0,01) untuk *quality insurance* dan level 10% untuk *political polling*.
- Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value* (probability value). Jika *p-value* (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value* (signifikan) $< \alpha$, maka hipotesis diterima.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang berhasil dikumpulkan, hasil pengolahan data dan pembahasan dari hasil pengolahan data tersebut. Adapun urutan pembahasan adalah sebagai berikut; deskripsi hasil pengumpulan data, pengujian asumsi klasik, analisis data yang berupa hasil analisis regresi logistik dan pembahasan tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam hal ini kepemilikan terpusat (mayoritas), kepemilikan internal, proporsi dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit terhadap kualifikasi dalam laporan audit.

4.1.1 Pengumpulan data

Pada penelitian ini digunakan model regresi logistik dengan desain penelitian dari 20 perusahaan pada tahun pengamatan yang mendapatkan kualifikasi dalam laporan auditnya dan 20 perusahaan pada tahun pengamatan yang tidak mendapatkan kualifikasi dalam laporan auditnya, sehingga total sampel yang digunakan adalah sebanyak 120 perusahaan dalam tiga tahun periode pengamatan. Data mengenai nama-nama emiten yang telah membentuk komite audit dan mengangkat komisaris independen diperoleh dari Pengumuman BEJ No.Peng-1203/BEJ-PSR/10-2003 mengenai Pembentukan Komite audit. Data berupa laporan keuangan yang sudah diaudit dapat diperoleh dari *data base* yang dimiliki oleh jurusan akuntansi FE UMS dan mengunduh dari www.idx.co.id *website* resmi Bursa Efek Indonesia. Sedangkan informasi lain seperti porsi kepemilikan saham perusahaan, komite audit, dewan komisaris dan sebagainya dapat diperoleh dari prospektus perusahaan dengan *mengcopy* dari Pojok BEI beberapa universitas seperti Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya, dan *Indonesian Capital*

Market Directory (ICMD) tahun 2003, 2004 dan 2005. Jumlah seluruh perusahaan sampai tahun 2005 kecuali lembaga keuangan yang terdaftar sebanyak 271 perusahaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 40 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, dimana 20 perusahaan yang mendapatkan kualifikasi dalam laporan audit dan 20 perusahaan yang mendapatkan bukan kualifikasi dalam periode tahun pengamatan yang sama.

4.1.2 Hasil Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan pengujian multikolinearitas dan pengujian regresi logistik terlebih dahulu disajikan statistik deskriptif yang dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini:

TABEL 4.1
STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics									
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
block	120	43,20	181,00	97,0365	35,80699	,502	,221	-,631	,438
ins_ow n	120	5,16	19,76	9,6961	3,91234	1,027	,221	-,142	,438
board	120	5,14	9,60	6,6964	,90040	,363	,221	,497	,438
AC	120	4	9	5,70	1,435	,508	,221	-,784	,438
Sales	120	,000	12,728	10,29549	2,045883	-2,336	,221	9,138	,438
Lev	120	,003	1,406	,26205	,266421	1,766	,221	4,305	,438
Prof	120	-,094	1,853	,12936	,310444	4,226	,221	19,011	,438
Liq	120	,426	10,741	2,15558	1,702715	2,982	,221	11,399	,438
Valid N (listw ise)	120								

Sumber : Data Sekunder diolah, 2009

Pada tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif perusahaan-perusahaan sampel dalam penelitian ini. Dari keseluruhan 120 data yang digunakan tampak bahwa rata-rata memiliki nilai kepemilikan terpusat sebesar 97,0365 dengan standar deviasi sebesar 35,8 dengan nilai maksimum adalah 181,00 dan minimum adalah 43,20. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepemilikan saham terpusat (kepemilikan mayoritas) perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Variabel kepemilikan internal menunjukkan rata-rata sebesar 9,6961, dengan standar deviasi sebesar 3,91, serta nilai maksimum adalah 19,76 dan minimum adalah 5,16. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepemilikan saham internal dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Variabel proporsi dewan komisaris menunjukkan rata-rata sebesar 6,6964, dengan standar deviasi sebesar 0,900, serta nilai maksimum adalah 9,60 dan minimum adalah 5,14. Hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan sampel telah memiliki komisaris independen sesuai dengan peraturan BEI, dimana proporsi Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh Dewan Komisaris.

Variabel anggota Komite Audit menunjukkan rata-rata sebesar 5,7167, dengan standar deviasi sebesar 1,43, serta nilai maksimum adalah 9,00 dan minimum adalah 4,00. Hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan di Indonesia yang telah membentuk komite audit mempunyai jumlah anggota yang memenuhi persyaratan minimal 3 orang.

Untuk variabel kontrol *L_Sales* mempunyai nilai rata-rata sebesar 10,29549. Kemudian *Leverage* mempunyai nilai mean 0,26205 atau sebesar 26,205%, *profitability* nilai rata-ratanya sebesar 0,12936 atau 12,936% dan *Liquidity* mempunyai nilai mean 2,15558. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kondisi keuangan yang sehat dan jauh dari kemungkinan kegagalan usaha.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian, maka harus dilakukan pengujian asumsi ekonometrik yang melandasinya. Oleh karena itu sebelum dilakukan

pengujian pengujian regresi logistik dan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji multikolinearitas.

4.1.3.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2005). Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Hasil pengujian asumsi multikolinearitas untuk variabel dependen opini audit dapat dilihat berdasarkan nilai *variance inflation factor* (VIF) pada tabel 4.4 berikut ini:

TABEL 4.2
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

		Coefficient ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,114	,534		,213	,832		
	block	,001	,001	,067	,701	,485	,857	1,166
	ins_ow n	-,001	,012	-,011	-,116	,908	,915	1,093
	board	,068	,051	,122	1,339	,183	,927	1,078
	AC	-,027	,032	-,078	-,857	,394	,925	1,081
	Sales	,015	,022	,059	,661	,510	,956	1,046
	Lev	,164	,173	,087	,949	,345	,924	1,082
	Prof	,090	,145	,055	,615	,540	,957	1,045
	Liq	-,091	,027	-,310	-3,385	,001	,926	1,080

a. Dependent Variable: AO

Sumber: Data Sekunder diolah, 2007

Dilihat dari output tabel 4.2, nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih besar dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.1.4 Hasil Uji kesesuaian Model (*Hosmer and Lemeshow Test*)

Sebelum melakukan pengujian regresi logistik, langkah yang ditempuh adalah menilai kelayakan model regresi. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H0: Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

H1: Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Hasil pengolahan data didapat nilai Hosmer and Lemeshow Test sebagai berikut:

TABEL 4.3

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,589	8	,378

Sumber : Data sekunder diolah, 2009

Dari output pada tabel 4.3 terlihat nilai sig sebesar 0,378 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ sehingga Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik yang digunakan cukup baik menggambarkan pengaruh struktur *corporate governance* terhadap kualifikasi dalam laporan audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, digunakan model regresi logistik yang menguji pengaruh kualifikasi dalam laporan audit dengan struktur *corporate governance* dan hasil output di atas, dapat dibuat persamaan *logistic regression* sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{\text{AO}}{1-\text{AO}} = -1,362 + 0,003\text{Block} - 0,009\text{Ins_Own} + 0,305\text{Board} - 0,077\text{AC} \\ + 0,05\text{L_Sales} + 0,781\text{Lev} + 0,406\text{Prof} - 0,615\text{Liquidity}$$

$\text{Ln} \frac{\text{AO}}{1-\text{AO}}$ = Variabel Dummy Opini Audit

Block = Proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham

Ins_own = Proporsi saham yang dimiliki oleh dewan komisaris

Board = Jumlah anggota dewan komisaris

AC = Jumlah anggota komite audit

Prof = ROA

L_sales = ukuran perusahaan

Lev = *Leverage*

Liquidity = Likuiditas

Hipotesis yang diajukan diuji dengan menggunakan uji Rasio Likelihood (G). Hasil pengujian menggunakan SPSS menghasilkan output sebagai berikut:

TABEL 4.4
HASIL REGRESI LOGISTIK

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	block	,003	,006	,286	1	,593	1,003
	ins_ow n	-,009	,054	,025	1	,873	,991
	board	,305	,237	1,655	1	,198	1,357
	AC	-,077	,145	,285	1	,593	,926
	Sales	,050	,101	,241	1	,623	1,051
	Lev	,781	,791	,975	1	,323	2,184
	Prof	,406	,697	,339	1	,560	1,500
	Liq	-,615	,202	9,257	1	,002	,541
	Constant	-1,362	2,430	,314	1	,575	,256

a. Variable(s) entered on step 1: block, ins_ow n, board, AC, Sales, Lev, Prof, Liq.

Sumber: Data sekunder diolah, 2009

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	145,824 ^a	,157	,210

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data sekunder diolah, 2009

Hasil Nakelkerke R Square (R^2) = 2,1%, ini menunjukkan bahwa Opini audit sebagai variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 2,1% oleh variabel independen yang digunakan sedangkan sisanya 97,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

4.2.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Dari output tabel 4.4 terlihat nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan terpusat 0,593 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dan mempunyai nilai koefisien bertanda positif. Dengan demikian tidak dapat menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Semakin besar kepemilikan yang terpusat (mayoritas) dalam perusahaan cenderung kurang menerima kualifikasi dalam laporan audit. Hal

ini menunjukkan bahwa kepemilikan terpusat (mayoritas) tidak berpengaruh terhadap kualifikasi dalam laporan audit perusahaan.

4.2.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Dari output tabel 4.4 terlihat nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan internal sebesar 0,873 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dan mempunyai nilai koefisien bertanda negatif. Dengan demikian tidak dapat menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Semakin besar kepemilikan internal dalam perusahaan cenderung kurang menerima kualifikasi dalam laporan audit. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan internal tidak berpengaruh terhadap kualifikasi dalam laporan audit perusahaan.

4.2.3 Pengujian Hipotesis Ketiga

Dari output tabel 4.4 terlihat nilai signifikansi variabel proporsi dewan komisaris sebesar 0,198 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dan mempunyai nilai koefisien bertanda positif. Dengan demikian tidak dapat menerima hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan cenderung kurang menerima kualifikasi dalam laporan audit. Hal ini berarti proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualifikasi dalam laporan audit perusahaan.

4.2.4 Pengujian Hipotesis Keempat

Dari output tabel 4.4 terlihat nilai signifikansi variabel anggota komite audit sebesar 0,593 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dan mempunyai nilai koefisien bertanda negatif. Dengan demikian tidak dapat menerima hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit dalam perusahaan cenderung kurang menerima kualifikasi dalam laporan audit. Hal ini berarti

jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap kualifikasi dalam laporan audit perusahaan.

4.2.5 Pengujian Hipotesis Kelima

Variabel kontrol L-Sales yang merepresentasikan ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,623 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dan mempunyai nilai koefisien bertanda positif. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualifikasi dalam laporan audit perusahaan.

4.2.6 Pengujian Hipotesis Keenam

Variabel kontrol *Leverage* yang memproksikan resiko perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,323 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dan mempunyai nilai koefisien bertanda positif. Hal ini berarti bahwa resiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualifikasi dalam laporan audit perusahaan.

4.2.7 Pengujian Hipotesis Ketujuh

Variabel kontrol Profitability yang merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,560 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dan mempunyai nilai koefisien bertanda positif. Hal ini berarti bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualifikasi dalam laporan audit perusahaan.

4.2.8 Pengujian Hipotesis Kedelapan

Variabel kontrol Liquidity yang merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan kewajibannya mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ dan mempunyai nilai koefisien bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kualifikasi dalam laporan audit perusahaan.

Dari pengujian terhadap signifikansi model terlihat bahwa variabel kepemilikan terpusat signifikan pada probabilitas 0,593, variabel kepemilikan internal signifikan pada probabilitas 0,873, variabel proporsi dewan komisaris independen signifikan pada probabilitas 0,198 dan variabel jumlah anggota komite audit signifikan pada probabilitas 0,593. Dari persamaan regresi di atas terlihat bahwa *Log of Odds* kualifikasi dalam laporan audit berhubungan secara positif dengan kepemilikan terpusat (mayoritas) dan proporsi dewan komisaris independen.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Terpusat (Mayoritas) Terhadap Laporan Audit Kualifikasi

Pengujian hipotesis 1 perusahaan dengan kepemilikan terpusat, cenderung kurang menerima kualifikasi audit artinya semakin besar kepemilikan yang terpusat (mayoritas) dalam perusahaan cenderung kurang menerima kualifikasi dalam laporan audit. Pada hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan terpusat (mayoritas) dengan kualifikasi dalam laporan audit pada perusahaan. Dalam hal ini permasalahan yang timbul dalam *corporate governance* akibat adanya masalah keagenan yang muncul dalam perusahaan. Berkaitan dengan struktur kepemilikan, terjadi ketidakselarasan kepentingan antara dua kelompok pemilik perusahaan, yaitu *controlling* dan *minority shareholders*. Hal ini didukung oleh *agency theory* sebagaimana dijelaskan oleh Jensen and Meckling (1976) dan Fama and Jensen (1983) yang menyatakan bahwa jika masing-masing *stakeholder* perusahaan bertindak untuk kepentingan pribadi maka akan timbul *agency conflict*.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Citron dan Taffler (1992), Jansen dan Meckling (1976), Durnev dan Kim (2003). Ballesta dan Garcia-Meca (2005) menjelaskan bahwa dalam perusahaan yang lebih terkonsentrasi maka pemegang saham berukuran besar dapat menggunakan pengawasan tugas yang lebih efektif kepada pihak

manajemen perusahaan, sehingga pemegang saham dapat mengendalikan opini yang akan dikeluarkan oleh auditor.

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Internal Terhadap Laporan Audit Kualifikasi

Pengujian hipotesis 2 mengenai perusahaan dengan porsi kepemilikan oleh anggota dewan komisaris kurang menerima kualifikasi audit. Artinya semakin besar kepemilikan internal dalam perusahaan cenderung kurang menerima kualifikasi dalam laporan audit perusahaan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara semakin besarnya kepemilikan internal dalam perusahaan dengan kualifikasi dalam laporan audit pada perusahaan publik yang listing di BEI. Permasalahan ini pernah diangkat oleh Tjager *et al.*, (2003) yang menyatakan bahwa konsep pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) para pemegang saham dan pengendalian (*control*) para manajemen dalam korporasi telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini adalah para dewan (baik dewan komisaris maupun dewan direksi benar-benar bertindak bagi kepentingan para pemegang saham ? Akan hal ini argumen yang dikembangkan oleh para penganjur teori agensi ditahun 1970-an mengatakan bahwa para dewan (yakni para agen yang mewakili para pemegang saham) secara rasional akan bertindak bagi kepentingan mereka dan bukan dengan bijaksana dan adil bertindak bagi kepentingan pemegang saham.

Hasil akhir ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ballesta dan Meca (2005) yang menyatakan bahwa dalam perusahaan Spanyol terdapat kecenderungan untuk menerima kualifikasi laporan audit yang akan menurun seiring dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan. Hasil yang ada menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan akan menyatukan kepentingan antara pihak

manajemen perusahaan dan pihak pemegang saham, yang mengarah pada semakin baiknya pengawasan yang dilakukan terhadap pihak manajemen guna memperoleh laporan yang bersih.

4.3.3 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Laporan Audit Kualifikasi

Pengujian hipotesis 3 kecenderungan perusahaan menerima kualifikasi audit dipengaruhi oleh jumlah anggota dewan komisaris independen, artinya proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan cenderung kurang menerima kualifikasi dalam laporan audit menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara proporsi dewan komisaris independen dengan kualifikasi dalam laporan audit pada perusahaan. Ada beberapa penjelasan atas hasil tersebut. Pertama, pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan yang akan berdampak ke opini yang akan diberikan auditor.

Kedua, ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut dapat mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris. Tetapi jika pengangkatannya belum dilandasi kebutuhan perusahaan tapi hanya sebatas pemenuhan regulasi, maka proporsi dewan komisaris mungkin tidak perlu diperbanyak, tetap sesuai peraturan yang ada (minimal 30%), dan dilihat keefektifan dewan komisaris dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Ballesta dan Garcia-Meca (2005) bahwa kecenderungan sebuah perusahaan menerima kualifikasi dalam laporan audit dipengaruhi oleh besarnya keanggotaan dewan komisaris dalam perusahaan tersebut. Tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Jensen (1993) yang

menegaskan bahwa susunan dewan komisaris independen dalam perusahaan yang berukuran besar dapat juga berhubungan dengan makin berkurangnya kemampuan untuk saling mengadakan komunikasi, koordinasi dan pengawasan, hal ini akan mengakibatkan pihak dewan direksi dalam perusahaan cenderung untuk berfungsi secara tidak efektif, dan akibatnya kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan akan memburuk.

4.3.4 Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Laporan Audit Kualifikasi

Pengujian hipotesis 4 mengenai kecenderungan perusahaan menerima kualifikasi audit dipengaruhi oleh jumlah anggota komite audit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah anggota komite audit terhadap kualifikasi dalam laporan audit perusahaan. Hal ini disebabkan komite audit belum maksimal melaksanakan fungsinya sehingga jumlah anggota yang besar tidak berpengaruh terhadap perusahaan yang akan menerima kualifikasi dalam laporan auditnya. Belum maksimalnya fungsi dari komite audit juga dikarenakan memang peraturan yang ada masih berupa surat edaran, sehingga perusahaan masih belum menganggap pentingnya fungsi dari komite audit bagi perusahaan.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wiedman (2002) yang menyatakan bahwa beberapa faktor seperti *corporate governance*, *board independen*, *audit committee expertise*, *the role of auditor* dan independensi auditor mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Tetapi hasil ini sejalan dengan pendapat Vincentus Anthony dalam Media Akuntansi yang tidak yakin Komite Audit efektif dalam menjalankan fungsinya. Dikatakan semasa Komite Audit masih mendapat manfaat/benefit dari perusahaan, independensinya sulit diwujudkan. Baysinger dan Butler (1985) mengemukakan bahwa independensi serta komposisi anggota Komite Audit merupakan faktor penting dalam kesuksesan Komite Audit

4.3.5 Pengaruh Berbagai Ukuran keuangan terhadap Laporan Audit Kualifikasi

Pengujian berbagai ukuran finansial yang dilakukan menunjukkan adanya hasil yang beragam. Variabel ukuran perusahaan yang didapat dari nilai logaritma penjualan total selama satu tahun, menunjukkan hasil *logistic regression* yang tidak signifikan. Demikian pula dengan dua variabel kontrol yang lain yaitu resiko yang didapat dari nilai *leverage* yaitu hutang jangka panjang dibagi total aset. Dan profitabilitas yang diperoleh dari laba usaha sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset, keduanya menunjukkan hasil pengujian regresi logistik yang tidak signifikan. Artinya ketiga variabel kontrol tersebut, meskipun kerap digunakan sebagai dasar pemberian kualifikasi dalam opini audit, dalam penelitian ini tidak terbukti berpengaruh terhadap kualifikasi audit.

Sedangkan variabel kontrol terakhir yaitu likuiditas yang merupakan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang-hutangnya yang diperoleh dari perhitungan rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar menunjukkan hasil pengujian regresi logistik yang signifikan dengan nilai signifikansi 0,002. Hal ini membuktikan bahwa selama kurun 2003-2005 kecuali lembaga keuangan, perusahaan yang mendapatkan kualifikasi dalam laporan auditnya dikarenakan permasalahan likuiditas. Selanjutnya, seluruh struktur *good corporate governance* yang diteliti dalam penelitian ini, tidak memiliki pengaruh dalam kualifikasi audit.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* kualifikasi audit. Corporate governance yang diuji sebagai variabel independen dalam penelitian ini merupakan struktur CG yang terdiri dari kepemilikan terpusat (mayoritas), kepemilikan internal dalam perusahaan, proporsi dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit. Agar hasil pengujian tidak bias, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang dalam beberapa penelitian sebelumnya merupakan penyebab perusahaan menerima kualifikasi audit (Ballesta and Garcia-Meca, 2005). Variabel kontrol tersebut adalah ukuran perusahaan, resiko, kemampuan perusahaan memperoleh laba (performen perusahaan) dan likuiditas atau kemampuan perusahaan mengembalikan hutangnya.

Penelitian ini menggunakan sampel 40 perusahaan dimana 20 perusahaan mendapatkan kualifikasi dalam laporan auditnya dan 20 perusahaan mendapatkan bukan kualifikasi dalam laporan auditnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan total sampel adalah 120 selama periode tahun pengamatan 2003-2005. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut.

5.1.1. Kepemilikan Terpusat

Variabel kepemilikan terpusat menunjukkan nilai koefisien yang bertanda positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,593. Dengan demikian, meskipun pengaruhnya tidak signifikan, semakin besar kepemilikan terpusat (mayoritas) dalam perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk mendapatkan kualifikasi dalam laporan audit semakin besar. Hal ini bertentangan dengan pemikiran logis bahwa apabila seseorang memiliki kepemilikan yang mayoritas atas suatu perusahaan semestinya mempunyai fungsi pengendalian dan pengawasan yang lebih besar atas

aktivitas perusahaan sehingga kemungkinan untuk mendapatkan audit kualifikasi semakin kecil. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemilik yang memiliki proporsi mayoritas tersebut, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehingga pengendalian dan pengawasan yang dilakukannya justru menjadikan perusahaan tidak beraktifitas sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, perusahaan lebih mempunyai kecenderungan mendapatkan kualifikasi audit.

Lebih lanjut, kembali pada teori awal yang mendasari penelitian ini, *agency theory*. Yaitu adanya pemisahan antara *agent* dan *principal* menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Sehingga pemilik, meskipun memiliki mayoritas saham perusahaan karena memiliki informasi yang terbatas menjadikannya tidak mempunyai banyak sumber daya untuk melakukan pengendalian dalam perusahaan. Dengan demikian kemungkinan mendapatkan kualifikasi audit semakin besar. Seluruh kemungkinan tersebut tentu membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya.

5.1.2. Kepemilikan Internal

Variabel kepemilikan internal menunjukkan nilai koefisien yang bertanda negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,873. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa saat manajer perusahaan adalah salah satu pemilik saham perusahaan maka mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingan dari perusahaan dan berusaha untuk mempersiapkan laporan keuangan yang cenderung kurang menarik perhatian para auditor untuk mengeluarkan kualifikasi dalam laporan auditnya. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Frankforter *et al.*, (2007) menyebutkan bahwa kemampuan atau kekuatan terbagi menjadi kekuatan personal dan kekuatan institusional. Seorang (CEO/manajer) mempunyai kekuatan personal (*personal power*) untuk melakukan kepemimpinan pada perusahaan. Apabila manajer tersebut ternyata

tidak memiliki personal power yang memungkinkannya untuk memimpin perusahaan secara efektif, dapat dipahami apabila kepemimpinannya kurang berhasil. Sehingga walaupun manajer tersebut juga seorang pemilik mayoritas perusahaan, tetapi jika dia tidak melakukan kepemimpinan dengan baik, maka kemungkinan mendapatkan audit kualifikasi juga semakin besar. Hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

5.1.3. Proporsi Dewan Komisaris

Variabel Proporsi Dewan Komisaris menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,198. Hal ini berarti kecenderungan perusahaan menerima kualifikasi dalam laporan auditnya akan meningkat seiring meningkatnya proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan. *Agency theory* menyatakan bahwa untuk meningkatkan independensi dewan komisaris dari manajemen diperlukan jumlah anggota dewan yang lebih besar dari luar perusahaan (independen). Anggota dewan yang independen diharapkan dapat menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap manajemen yang mempunyai sifat oportunistik (Zahra and Pearce, 1989). Kehadiran dewan komisaris independen diharapkan mampu membawa performen perusahaan menjadi lebih baik karena dapat menyelenggarakan arahan strategis serta dapat mempengaruhi kualitas negosiasi dan keputusan manajemen. Dengan demikian, proporsi dewan komisaris independen yang semakin besar diharapkan akan mampu meningkatkan aktifitas manajemen yang lebih efektif, sehingga menyebabkan perusahaan tidak akan atau kurang menerima kualifikasi audit.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *agency theory* tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan penjelasan akan hal ini. Yaitu bahwa perusahaan merekrut anggota komisaris independen ke dalam susunan dewan komisaris adalah untuk keperluan pemenuhan regulasi saja

sehingga kurang mempertimbangkan kapasitas anggota komisaris independen tersebut. Selanjutnya, walaupun terdapat anggota independen dalam dewan komisaris, namun jika tidak memiliki *power of control* terhadap aktifitas perusahaan tentu menjadi tidak berarti. Hal ini juga memerlukan pembuktian dalam penelitian lebih lanjut.

5.1.4. Komite Audit

Variabel keanggotaan Komite Audit memiliki koefisien bertanda negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,593. Dengan demikian, kecenderungan perusahaan untuk mendapatkan kualifikasi dalam laporan auditnya lebih besar seiring dengan banyaknya jumlah anggotakomite audit. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya (Xie *et al*, 2003) yang menyatakan bahwa audit komite yang independen dan kompeten akan melakukan peran pengawasan yang efektif, efisien dan aktif. Penjelasan akan hasil penelitian ini dapat disebabkan karena kurangnya independensi dan kompetensi anggota komite audit sehingga tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal. Lebih lanjut ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas komite audit pada penelitian ini hanya didasarkan pada jumlah anggota komite audit, dimana seharusnya ada ukuran lain yang dapat digunakan yaitu jumlah pertemuan yang digelar oleh komite audit per tahunnya yang lebih mencerminkan efektifitas komite audit. Selanjutnya, dapat juga digunakan ukuran independensi komite audit yaitu proporsi anggota independennya. Namun kedua ukuran tersebut, datanya kurang tersedia secara lengkap di Indonesia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan hal ini.

5.1.5. Variabel Kontrol: Ukuran, Resiko, Profitabilitas dan Likuiditas

Ukuran perusahaan yang diperoleh dari logaritma penjualan tahunan, resiko yang diperoleh dari *leverage* yaitu hutang jangka panjang dibagi total aset dan profitabilitas yang merupakan performen perusahaan yang diperoleh dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi total

aset, ketiga variabel finansial tersebut tidak terbukti mempengaruhi kualifikasi audit secara signifikan. Secara berturut-turut ketiganya memiliki level signifikansi sebesar 0,623; 0,323 dan 0,560. Tetapi karena ketiga variabel tersebut mempunyai tanda positif, artinya semakin besar ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitasnya, maka kecenderungan untuk menerima kualifikasi audit juga semakin besar.

Untuk *leverage* yang memproksikan resiko, hal tersebut dapat dipahami. Karena semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan, kemungkinan mendapatkan kualifikasi audit juga semakin besar. Sedangkan untuk ukuran perusahaan Parker *et al.*, (2002) menemukan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan dengan kebangkruta perusahaan. Menggunakan dasar dari hasil penelitian tersebut, dapat dipahami jika semakin besar perusahaan cenderung akan semakin menerima kualifikasi audit dikarenakan karena kecenderungan ke arah kebangkrutan yang semakin besar.

Variabel *profitability* juga mempunyai pengaruh positif yang kurang signifikan terhadap kualifikasi audit. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Ballesta dan Garcia-Meca, 2005). Terakhir, untuk variabel *liquidity* adalah satu-satunya variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualifikasi audit dengan nilai signifikansi 0,002 dan mempunyai tanda yang negatif. Artinya semakin rendah likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutangnya maka semakin tinggi kecenderungan dalam menerima kualifikasi audit. Hasil ini didukung oleh berbagai literatur sebelumnya (Ballesta and Garcia-Meca, 2005; Parker *et al*, 2002; Leitenen and Leitenen, 1998)

5.2. Implikasi Hasil Penelitian

Bukti empiris yang ditemukan dari hasil penelitian ini memilih beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Bagi auditor, sebagai bahan pertimbangan untuk mengidentifikasi perusahaan yang cenderung akan mendapatkan kualifikasi dalam laporan auditnya atau untuk memonitor dan mengawasi pihak perusahaan yang potensial.
2. Bagi calon investor, yang akan menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan dapat mencermati perusahaan-perusahaan yang cenderung menerima kualifikasi dalam laporan auditnya.
3. Bagi pemerintah atau Bapepam sebagai bahan evaluasi bahwa opini audit dalam pelaporan keuangan yang diberikan oleh auditor mencerminkan kualitas dari jasa atau layanan auditing, maka diharapkan adanya regulasi yang tegas mengenai hal tersebut.

5.3. Keterbatasan dan Saran

Hasil analisis yang dikemukakan dalam penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang sebaiknya menjadikan perhatian bagi penelitian selanjutnya dan kiranya dapat disarankan untuk pengembangan penelitian di bidang struktur *corporate governance*:

1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun pengamatan 2003-2005 kecuali lembaga keuangan. Ternyata kondisi yang ada di lapangan perusahaan yang memenuhi kriteria opini audit yang berupa kualifikasi (Wajar Dengan Pengecualian) dari total 271 sangat sedikit. Diharapkan populasi yang diambil dalam penelitian selanjutnya lebih luas lagi dengan menambahkan tahun pengamatan sehingga dapat mengeneralisasi penelitian.
2. Untuk penelitian yang akan datang bisa memperluas hasil penelitian ini kedalam bentuk alat ukur lainnya dari struktur *corporate governance* yang meliputi:
 - a. Komite audit memiliki pengukuran lain selain jumlah anggotanya, yaitu: independensi anggota komite audit, dan jumlah pertemuan yang digelar komite audit setiap tahunnya.

Sedangkan Rahman dan Ali (2006) mengajukan suatu pengukuran lain yaitu kompetensi komite audit yang didapat dari kemampuan dan pengetahuan komite audit dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga hal itu dapat dilihat dari background pendidikan. Yaitu bidang ekonomi akuntansi. Lebih lanjut Rahman dan Ali (2006) juga mengajukan pengukuran komite audit yang lain yaitu independensi komite audit. Tetapi sepanjang pengetahuan penulis, di Indonesia data tersebut belum tersedia.

- b. Dewan komisaris yang efektif adalah dewan komisaris yang memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsinya (Rahman dan Ali, 2006). Kompetensi tersebut dapat diukur berdasar jumlah tahun pengalaman yang dimilikinya dalam *core business* yang sama dengan perusahaan yang dipimpinnya.
- c. Membedakan KAP yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi KAP besar (lima besar) dan KAP kecil. Karena menurut Farrugia and Baldacchino, 2005, menyatakan bahwa perusahaan yang diperiksa oleh KAP besar mempunyai frekuensi yang lebih besar dalam menerima kualifikasi audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauer R, Guenster N and Otten R. 2004. Empirical evidence on corporate governance in Europe: The effect on stock returns, firm value and performance *Journal of Asset Management* Vol. 5, 2, 91–104
- Arifin. 2005. *Peran Akuntan dalam menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan perspektif Agency Theory)*, Pidato pengukuhan guru besar, BP Undip
- Ballesta JPS and Garcia-Meca E, 2005. Audit Qualifications and Corporate Governance in Spanish Listed Firm, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20 No. 7, 725-738
- Caramanis, Constantinos and Spathis, Charalambos. 2006. Auditee and audit firm characteristics as determinants of audit qualifications Evidence from the Athens stock exchange, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 No. 9, 2006, pp. 905-920
- Fajari AA, 2005, “*Good Corporate Governance*”, *Sebuah Keharusan*, Kompas April 2005
- Farrugia Konrad J and Baldacchino Peter J, Qualified audit opinions in Malta, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20 No. 8, 2005pp. 823-843
- Frankforter, Steven A, James H. Davis, David A. Vollrath, Vanessa Hill, Determinants of Governance Structure among Companies: A Test of Agency Theory Predictions, *International Journal of Management* Vol. 24 No. 3 September 2007
- Gaganis C and Pasiouras F. 2007. A multivariate analysis of the determinants of auditors’ opinions on Asian banks, *Managerial Auditing Journal*. Vol. 22 No. 3, pp. 268-287
- Herawaty V, 2008, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, , VOL. 10, NO. 2, NOVEMBER 2008: 97-108
- Herwidayatmo, 2000, *Implementasi Good Corporate Governance untuk perusahaan publik Indonesia*, Usahawan No. 10 Th XXIX, Oktober
- Hua LG, 1996, Audit Qualification: what Does It Mean? *Singapore Management Review*, 78-80
- Hudaib, M and Cooke T.E, 2005, The Impact of Managing Director Changes and Financial Distress on Audit Qualification and Auditor Switching, *Journal of Business Finance&Accounting*, 32(9) & (10), 1703-1739
- Husnan, S. 2007. *Corporate Governance di Indonesia, Pengamatan Terhadap Sektor Korporat dan Keuangan*, <http://matakuliah.files.wordpress.com/2007/09/perekin-2.pdf>
- Keasey, K., Watson, R. and Wynarczyk, P. (1988), “The Small Company Audit Qualification: A Preliminary Investigation”, *Accounting and Business Research*, Vol. 18 No. 72, pp. 323-33.

- Loudder ML, Khurana IK, Sawyers R, Cordery C, Johnson C, Lowe J, and Wunderle R. 1992. The Information Content of Audit Qualifications. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol. 11, No. 1. 69-82
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. "Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen". Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Parker S, Peters GF, Turetsky H.F. 2005. Corporate Governance Factors and Auditor Going Concern Assessment, *Review of Accounting and Finance*, Vol 4, 5-29
- Piot, C. (2001), "Agency Costs and Audit Quality: Evidence from France", *The European Accounting Review*, Vol. 10 No. 3, pp. 461-99.
- Pucheta-Martinez, Maria C dan de Fuentes, Cristina, The Impact of Audit Committee Characteristics on the Enhancement of the Quality of Financial Reporting: an Empirical study in the Spanish Context, *Corporate Governance*, Vol 15 Number 6, 1394-1412
- Pratolo S, 2007, *Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta Tinjauannya pada jenis Perusahaan, SNA X*
- Rahman, Rashidah Abdul dan Fairuzana Haneem Mohamed Ali, Board, audit committee, culture and earnings management: Malaysian evidence; *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 No. 7, 2006, pp. 783-804
- Rezaee Z, Olibe K.O and Minmier G, Improving Corporate Governance: the Role of Audit Committee Disclosure, *Managerial Auditing Journal*, 2003, 530-537
- Sari, Novita, *Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Kualifikasi dalam Laporan Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*, Thesis tidak dipublikasikan, Magister Sains Akuntansi Undip, 2008
- Shin-Ping, Lee dan Tsung-Hsien, Chuang, The determinants of corporate performance A viewpoint from insider ownership and institutional ownership, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24 No. 3, 2009 pp. 233-247
- Sulistiyanto dan Wibisono. 2003. Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?, *Jurnal Widya Warta*, No.2 Tahun XXVI/Juli 2003,
- Turley S and Zaman M. 2007. Audit committee effectiveness: informal processes and behavioural effects Accounting, *Auditing & Accountability Journal*, Vol. 20 No. 5, pp. 765-788

Vanasco, Rocco R, The Audit Committee: An International Perspective, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 9 No. 8, 1994, pp. 18-42

LAMPIRAN 1.

DAFTAR PERUSAHAAN YANG MENDAPATKAN OPINI AUDIT KUALIFIKASI

No.	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	ARGO	Argo Pantes Tbk
2	ASIA	Asiana Grain International Tbk
3	CMPP	Centris Multi Persada Pratama Tbk
4	CMNP	Citra Marga Nusaphala persada Tbk
5	EPMT	Enseval Putra Megatrading
6	MYRX	Hanson International Tbk
7	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
8	IMAS	Indomobil sukses International Tbk
9	MORE	Indonesia Prima Property Tbk
10	IDKM	Indosiar Karya Media Tbk
11	JIHD	Jakarta Int'l Hotel & Development Tbk
12	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
13	JPFA	JAPFA Tbk
14	KOPI	Korpora Persada Investama Tbk
15	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
16	LSIP	PP London Sumatera Tbk
17	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk
18	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Asia Intiselera)
19	PTRA	New Century DevelopmentTbk
20	SHID	Hotel Sahid Jaya International Tbk

DAFTAR PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAPATKAN OPINI AUDIT KUALIFIKASI (OPININYA WAJAR TANPA SYARAT)

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	META	Nusantara Infrastructure Tbk
2	JAKA	Jaka Inti realtindo Tbk
3	INAF	Indofarma Tbk
4	FORU	Fortune Indonesia Tbk
5	FPNI	Fatrapolindo Nusa Industry Tbk
6	FISH	FKS Multi Argo Tbk
7	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk
8	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
9	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk
10	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk
11	KBLI	GT Kabel Indonesia Tbk
12	INTA	Intraco Penta Tbk
13	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

14	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk
15	JRPT	Jaya Real properti Tbk
16	IGAR	Kageo Igar Jaya Tbk
17	KARK	Karka Yasa Profilia Tbk
18	KARW	Karwell Indonesia Tbk
19	KIJA	Kawasan Industry Jababek Tbk
20	LAMI	Lamicitra Nusantara Tbk